

## DLH DKI Musnahkan 1.231 Kg Masker Bekas Warga

JAKARTA (IM) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta musnahkan sebanyak 1.231 kilogram limbah masker sekali pakai dari rumah tangga selama masa pandemi Covid-19.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Syarifudin mengatakan data limbah infeksius tersebut terhitung dari bulan April hingga pertengahan Desember 2020.

"Dari awal Pandemi pada bulan April, Jakarta sudah melakukan penanganan limbah infeksius dari rumah tangga secara rutin hingga saat ini. Ini dilakukan agar limbah infeksius bisa ditangani dengan baik dan menghindari potensi penularan Covid-19," ujar Syarifudin dalam keterangannya, Rabu (16/12).

Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) DLH DKI Jakarta, Rosa Ambarsari menambahkan, petugas kebersihan melakukan pemilahan dan pengumpulan limbah infeksius dari rumah tangga

seperti masker bekas untuk ditangani dengan semestinya.

DLH DKI Jakarta bekerjasama dengan pihak pengolah limbah B3 berizin untuk pemusnahannya.

"Masker bekas tergolong limbah infeksius, Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan pihak pengolah limbah B3 untuk pemusnahannya, dengan cara diinsinerasi," kata Rosa.

Ia pun berharap agar masyarakat, khususnya ibu rumah tangga untuk mulai sadar bahwa memilah sampah adalah hal yang penting untuk dilakukan, terutama pada masa pandemi ini.

"Kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga untuk mulai menyadari bahwa memilah sampah medis rumah tangga adalah hal yang penting untuk dilakukan. Kita sama-sama memilah dan memisahkan sendiri. Kemudian, disemprom disinfektan dan dikemas khusus. Setelah itu tanggung jawab kami untuk penanganan lebih lanjut," tutur Rosa. ● **ber**



### BUKU TAMU DIGITAL DI KANTOR PEMERINTAHAN JAKARTA

Warga memindai kode batang buku tamu digital saat mengurus administrasi kependudukan di Kantor Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta, Rabu (16/12). Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan fitur Jejak atau buku tamu digital melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) di 33 lokasi tempat umum dan kantor pemerintahan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian penyebaran COVID-19.

## Lapak Pedagang Taichan di Senayan City Ditutup

JAKARTA (IM) - Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi menutup sementara akses para pedagang sate taichan di lapangan parkir Senayan City. Alasannya, melanggar protokol kesehatan (prokes) saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi akhir pekan lalu.

"Saya sudah minta untuk menutup lokasi itu dulu sementara waktu. Senayan City juga sudah saya tegur dan berkomitmen menutup lokasinya agar tidak digunakan para pedagang itu," kata Irwandi saat ditemui di Jakarta, Rabu (16/12).

Irwandi mengatakan ia mendapatkan laporan adanya pelanggaran protokol kesehatan khususnya terkait kerumunan di tempat para pedagang sate taichan itu menjajakan dagangannya. Untuk memastikan tidak ada lagi laporan terkait kerumunan di kawasan Senayan Irwandi mengatakan akan

menyiagakan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP).

"Nanti akan kita jaga, agar mereka tidak pindah ke belakang. Ke Jalan Tentara Pelajar, ini akan dijaga oleh Satpol PP kita," ujar Irwandi.

Seperti diketahui, lapangan parkir Mal Senayan City memang digunakan untuk para pedagang taichan berdagang atas inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat perhelatan Asian Games 2018. Para pedagang sate taichan yang sebelumnya berjalan di sepanjang Jalan Asia Afrika itu pun hijrah dan akhirnya sudah dua tahun berdagang di lapangan parkir itu.

Namun, pada masa pandemi Covid-19 di Ibu Kota, para pedagang taichan itu tidak menjalankan protokol kesehatan. Para pedagang justru menimbulkan kerumunan yang berpotensi besar menjadi lokasi penyebaran virus asal Wuhan itu. ● **osm**

## 2 Anggota DPRD DKI Positif Covid-19

JAKARTA (IM) - Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta terkonfirmasi positif Covid-19. Keduanya adalah Ketua Fraksi Partai Golkar, Basri Baco dan Yudha Permana dari Fraksi Partai Gerindra.

Judistira Hermawan, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, membenarkan kabar Basri Baco positif Covid-19.

Menurut dia, Baco sempat ke luar kota untuk keperluan keluarga.

"Setelah itu ada reses Sosperta. Mungkin beliau capek imunnya turun atau gimana. Ada gejala, kemudian cek, rupanya positif Covid-19," ujar Judistira saat dikonfirmasi oleh wartawan pada Rabu (16/12).

Menurut Judistira, Baco kini dirawat di Rumah Sakit Tarakan. Ia mengalami gejala seperti batuk, tenggorokan terasa hangat, demam, namun tidak sesak.

Fraksi Partai Golkar, kata Judistira, sudah meminta anggotanya untuk tidak ke kantor jika tak ada agenda seperti rapat paripurna.

"Kami juga sudah minta Sekwan disinfektan ruangan," kata dia.

Adapun kabar Yudha Permana terkonfirmasi positif dibenarkan oleh anggota Fraksi Partai Gerindra Syarif.

Menurut dia, Yudha terkonfirmasi positif kemarin, Selasa, 15 Desember 2020 dan kini tengah menjalani isolasi mandiri di rumah lantaran tak bergejala.

Menurut Syarif, Yudha terpapar Covid-19 di luar lingkungan Fraksi Partai Gerindra.

"Dia sepertinya kontak di luar. Sudah tracing di dalam, teman-teman gak ada (yang kontak)," tutur Syarif. Ia pun mengatakan Yudha sudah lama tak datang ke DPRD. Kegiatan anggota dewan ia ikuti secara virtual. ● **osm**

# 4 | Metropolis

IDN/ANTARA



### PROGRES PEMBANGUNAN JALAN LAYANG TAPAL KUDA

Foto aerial pembangunan jalan layang tapal kuda di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (16/12). Pembangunan jalan layang tapal kuda di Lenteng Agung dengan panjang 880 meter yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI sebesar Rp140,8 miliar tersebut telah mencapai tahap akhir.

# DPRD DKI Minta Guru Pembuat Soal 'Anies Diejek Mega' Diberhentikan

Menurut Sekretaris Komisi E DPRD DKI, Johnny Simanjuntak, hasil rapat Komisi E DPRD meminta Pemprov DKI melakukan penindakan kepada guru terkait dan sekolah. Pasalnya, kesalahan itu bukan berupa kesalahan individu saja melainkan ada peran pengawasan sekolah yang terabaikan.

JAKARTA (IM) - Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (15/12), menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI dan guru terkait kasus soal "Anies diejek Mega". Rapat itu mendedikasikan kronologis terjadinya kasus berupa penerbitan soal ujian akhir semester kelas 7 di SMPN 250 Jakarta. Setelah menggelar rapat dengan pihak eksternal, Komisi E DPRD DKI melanjutkan dengan rapat internal. Menurut Sekretaris Komisi E DPRD DKI, Johnny Simanjuntak, hasil

rapat meminta Pemprov DKI melakukan penindakan kepada guru terkait dan sekolah. Pasalnya, kesalahan itu bukan berupa kesalahan individu saja melainkan ada peran pengawasan sekolah yang terabaikan.

"Jadi, intinya, memang kami minta supaya guru tersebut dihindari. Karena itu adalah kesalahan berat. Pokoknya, siapa yang merasa terkait. Karena kesalahannya bukan kesalahan perorangan saja. Okelah guru bikin soal, tapi kan ada tim telah. Kenapa itu sampai lolos? Kemudian

kepala sekolah bahkan instansi yang betul-betul mengawasi tim telah ini," papar Johnny saat dikonfirmasi, Rabu (16/12).

DPRD DKI meminta Pemprov DKI memberikan penindakan sesuai dengan PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adapun untuk posisi guru pembuat soal bernama Sukirno yang masih berstatus guru Kontrak Kerja Individu (KKI), DPRD DKI meminta agar yang bersangkutan tidak usah diperpanjang kontrak kerjanya di SMPN 250.

"Jadi, kami mengembalikan ke Pemprov DKI untuk menindak kasus sesuai PP 53 Tahun 2010. Kalau KKI tidak usah diperpanjang, orang ada kontrak. Kemarin, dia tidak mengaku. Katanya karena spontanitas. Kalau kita orang sederhana apakah mungkin muncul spontanitas itu. Berrarti kan dia mulai mencekoki siswa kan," ungkapnya.

"Kita bukan benci pada

gurunya. Ini tujuannya memberikan efek jera kepada yang lain," pungkasnya. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengesakan telah memberikan sanksi teguran kepada Sukirno, guru SMPN 250 Cipete yang kedapatan membuat soal ujian akhir semester menggunakan nama Gubernur Anies Baswedan dan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Selain itu, terang dia, akan

ada sanksi lanjutan berupa pencopotan dari posisi guru di sekolah tersebut. Namun, sanksi itu masih dipelajari Pemerintah Provinsi DKI. "Sementara sanksinya sesuai ketentuan adalah diberi peringatan. Kemungkinan yang bersangkutan juga akan kita ganti, tidak dipekerjakan kembali, sebagai sebuah sanksi kepada guru yang membuat soal tersebut," kata Riza, Senin (14/12). ● **han**

## Pemkot Bekasi Pertimbangkan Batasi Jam Operasional Tempat Hiburan

BEKASI (IM) - Pemerintah Kota Bekasi mempertimbangkan kembali dibatasinya pelaksanaan jam malam pada masa libur akhir tahun. Hal ini seiring dengan perintah Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, agar wilayah Jabodetabek memperpendek batas operasional mal, restoran, dan tempat hiburan hingga pukul 19.00 WIB.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengatakan, pembatasan jam operasional memungkinkan apabila fasilitas kesehatan di Kota Bekasi sudah semakin memipis. "Kita pertimbangkan. Kalau memang keadaan (fasilitas)-nya kita sudah tidak bisa menampung," terang Rahmat, kepada wartawan, Rabu (16/12).

Rahmat mengatakan, sejauh ini kapasitas fasilitas isolasi pasien Covid-19 di Kota Bekasi sudah tersisa seperempat saja. Bahkan di RSUD Chasbullah Abdulmajid, jumlah kasur yang terpakai mencapai 140 bed dari total yang tersedia 170 bed. "Di kota itu sudah hampir full. Saya lihat di RSU sudah 140 dari 170," jelasnya.

Adapun, saat ini jumlah kumulatif kasus Covid-19 di Kota Bekasi mencapai 12.674 kasus dengan kesembuhan sebanyak 11.709 kasus. Dilansir dari website resmi Pemerintah Kota Bekasi, total kasus aktif per hari ini jumlahnya mencapai 757 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 208 orang. ● **han**

## SOAL INSTRUKSI LUHUT

# Wagub DKI: Kami Sedang Lakukan Kajian PSBB Ketat

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masa libur panjang Hari Raya Natal dan Tahun Baru sesuai instruksi Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Rabu (16/12).

"Kami sedang melakukan kajian. Yang sekarang kan sudah kami berlakukan PSBB Transisi sampai tanggal 22 Desember. Nanti setelahnya kami akan umumkan wilayah mana dan unit mana yang perlu pengetatan," kata Riza kepada wartawan.

Menurut Riza, kajian yang dilakukan termasuk instruksi Luhut perihal pengetatan kebijakan bekerja dari rumah alias work from home (WFH) hingga 75 persen dari kapasitas gedung. Menurut Riza, kebijakan tersebut akan segera diberlakukan untuk lingkungan

Pemprov DKI. "Dalam bulan Desember ini akan kami berlakukan. Tentu kami harap tidak hanya di wilayah Pemda, ya. Tapi di pihak swasta dan kantor pemerintahan lain," tutur dia.

Seperti diketahui sebelumnya, Pemerintah pusat menjelang natal dan tahun baru 2021 memutuskan untuk mengurangi kerja dari kantor 25 persen untuk mencegah penularan Covid-19. Badan Kepegawaian

Daerah DKI Jakarta menyatakan bakal segera mengeluarkan surat edaran untuk penerapan sistem work from office maksimal 25 persen bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah DKI.

Kepala BKD, Chaidir, mengatakan surat edaran itu kini tengah digodok. "Surat edaran akan segera kami terbitkan dalam waktu dekat," kata Kepala BKD DKI Chaidir saat dihubungi, Selasa, 15 Desember 2020.

Chaidir menuturkan surat

edaran WFH atau kerja dari rumah 75 persen dimulai pada 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021. Surat edaran tersebut dibuat sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat bersama Senin, 14 Desember 2020.

Sejak masa pembatasan sosial berskala besar jilid dua, kata dia, Pemprov DKI telah menerapkan sistem 50 persen kapasitas untuk kerja dari kantor dan 50 persen kerja dari rumah sesuai Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Karena khawatir terhadap penyebaran yang lebih besar lagi maka dikurangi kapasitas WFO-nya," ujar dia. Adapun kebijakan pemerintah akan tetap memprioritaskan pegawai yang mempunyai penyakit bawaan seperti paru-paru, jantung, diabetes hingga yang hamil untuk tetap bekerja dari rumah. ● **osm**

## 1.600 Gereja di Jakarta akan Dijaga Ketat Saat Natal 2020

JAKARTA (IM) - Sebanyak 8.179 personel gabungan Polri, TNI, dan Pemprov DKI Jakarta dikerahkan dalam upaya pengamanan hari Natal dan perayaan tahun baru 2021. Sejumlah personel itu nantinya melakukan penjagaan di lebih dari 1.600 gereja di wilayah Jakarta.

"Pengamanan beberapa tempat (ibadah) ada 1.600 lebih gereja di Jakarta sini," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus kepada wartawan, Rabu (16/12).

Yusri menjelaskan, pengamanan dilakukan sejak malam misa agar baik mengantisipasi gangguan keamanan ataupun pelanggaran protokol kesehatan.

Pasalnya, perayaan malam misa diizinkan tetapi harus memperhatikan batasan untuk

mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.

"Untuk kegiatan malam misa sudah diatur dalam surat edaran Kepala Dinas Agama DKI Jakarta. Misalnya KMGJ Jakarta Timur mungkin (pelaksanaan) dua kali. Dihadiri 200 orang, sisanya menggunakan virtual Zoom ini disepakati bersama, termasuk beberapa gereja lain," kata dia.

Selain itu, polisi dan Dinas Pehubungan (Dishub) juga sudah disiapkan untuk mengatur lalu lintas di beberapa titik wilayah Jakarta pada saat perayaan pergantian tahun. "Masing-masing yang berhubungan seperti perhubungan dan lalu lintas akan rapat kembali. Tapi yang pasti, kita tegakan saat kegiatan malam tahun baru yang sifatnya berkerumun itu ditiadakan," tutup Yusri. ● **han**

## Keluar Masuk Jakarta Wajib Sertakan Hasil Rapid Test Antigen

JAKARTA (IM) - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyatakan bahwa mulai Jumat 18 Desember 2020 mendatang, keluar masuk wilayah DKI Jakarta harus menyertakan surat hasil pemeriksaan rapid test antigen.

"Mulai tanggal 18 (Desember 2020) sampai dengan tanggal 8 Januari (2021) semua wajib sertakan rapid test antigen," kata Syafrin dalam keterangan suara, Rabu (16/12).

Syafrin menjelaskan, penyertakan surat hasil rapid test antigen tersebut sudah menjadi kebijakan nasional. Setiap orang yang bepergian menggunakan transportasi umum keluar masuk Jakarta diwajibkan untuk melampirkan hasil tersebut. "Itu kan menjadi kebijakan nasional, artinya

bagi maskapai bagi yang akan membeli tiket itu diwajibkan calon penumpang melakukan hasil rapid," ucap Syafrin.

Dia juga menjelaskan, kebijakan tersebut berlaku untuk semua angkutan umum, baik angkutan udara, angkutan laut dan angkutan darat. Namun, untuk kendaraan pribadi, lanjut Syafrin, masih belum diberlakukan kebijakan penyertakan surat hasil rapid test antigen tersebut. "Enggak (untuk kendaraan pribadi), bagi calon penumpangnya yang wajib menyertakan hasil rapid test," kata dia.

Syafrin juga menjelaskan prioritas pengecekan akan dilakukan dari jalur udara untuk orang-orang yang akan keluar masuk ke wilayah Jakarta. "Kita prioritaskan di udara untuk menyertakan itu (rapid test antigen)," kata dia. ● **osm**



### PENUTUPAN SEMENTARA HALTE PASAR BARU

Warga beraktivitas di dekat Halte Pasar Baru yang ditutup sementara di Sawah Besar, Jakarta, Rabu (16/12). PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menutup sementara Halte Pasar Baru mulai 16 Desember 2020 hingga 16 Januari 2021 untuk melakukan perbaikan atau merenovasi halte tersebut.